

PENDIDIKAN BERWAWASAN MULTIKULTURAL

Dr. Hubertus Muda

Abstract:

The concept of multiculturalism is not merely comprehended as an acceptance or acknowledgement of differences. Multiculturalism has come to the fore in philosophical discussions emphasizing the importance of the acknowledgement of the other as a basis of individual and collective identity formation. And this formation could have been political, cultural, religious in essence. Multiculturalism denotes several cultures exist in a society, it has to do with cultures, and it points out to a plurality of cultures and it refers to a specific manner to responding to that plurality. Dialogue then becomes day to day a Religion in action. It has been a human natural need of equality and at the same time difference. We are unique not by "exclusion" but by "relation". To be catholic means first of all to be multicultural and this beyond boundaries attitude has vigorously strengthening and promoting religion for human rights, justice, peace, and harmony.

Kata-Kata Kunci: Pluralisme, Pengakuan, suara Hati, Dialog, Martabat Manusia

PENDAHULUAN

Pluralisme termasuk pluralisme agama tidak bisa dibantah dewasa ini. Pada saat dunia kita berhadapan dengan tanda zaman "pluralisme" ini lembaga apapun termasuk lembaga pendidikan harus dapat menempatkan diri secara arif dan etis agar tidak menderita sebuah penyakit sosial yang dikenal sebagai *pluralisme-fobia*. Pluralisme fobia akan membawa dampak sosial negatif yang dahsyat dan dapat menjadi sumber kekerasan baik kekerasan personal maupun kekerasan struktural.¹ Paradigma baru pendidikan tidak bisa digagas dewasa ini tanpa wawasan pluralis karena *civil society* yang merupakan tujuan pendidikan tidak bisa dicapai tanpa demokratisasi, otonomi, yang merupakan isi atau kandungan dari fenomena "pluralisme" tersebut. Karena itu lembaga pendidikan harus memiliki pandangan yang sehat mengenai pluralisme dan pilar-pilar pendidikan harus berkuat dengan pluralisme ini.² Pendidikan harus mampu memberikan peluang agar para peserta didik

1 Komarudin Hidayat & Muhammad Wahyudi Nafis, *Aqama Masa Depan, Perspektif Filsafat Perennial* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003) pp.31-35

2 Imam Barnadib, "Renungan Tentang Filsafat Pendidikan Dewasa Ini", dalam Sindhunata; (Ed.) *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*

dapat mengolah secara sehat dinamika *passing-over* sekaligus *coming back*, paradigma relasi sosial yang mandiri sekaligus solider, otonomi bukannya xenofobi, atau mampu meracik prinsip keberakaran sekaligus keterbukaan.

I. PLURALISME

Pluralisme dewasa ini sangat sering dimengerti sebagai sebuah kesadaran yang mengarah kepada penerimaan yang positif terhadap segala bentuk diversitas atau perbedaan. Penerimaan ini tidak dimaksudkan sebagai upaya menyatukan diversitas kepada kesatuan tertentu sebagai bentuk alienasi dari kesatuan asalnya apalagi lewat manipulasi yang reduksionistik. Karena itu orang lalu membedakan pluralisme dari pluralitas. Pluralisme itu adalah "sikap non-dualistik" atau "bukan ini dan bukan itu". Dengan ini mau dikatakan bahwa "pluralisme" memberi peluang terhadap sikap non-dualistik yang mengakui bahwa realitas itu pluralistik, yaitu yang tidak dapat diukur, baik oleh unitas maupun oleh pluralitas. Karena itu pluralisme tidak dapat dibatasi oleh sistem manapun. Pluralisme yang luas dan akbar itu akan membuat kita sadar akan kontingensi atau keterbatasan kita sendiri. Pluralisme bahkan digolongkan dalam "misteri" yang tak dapat dijangkau secara total.³

Pluralisme adalah unsur dari multikulturalisme.⁴ Sering sekali dibedakan antara multikulturalisme deskriptif dan multikulturalisme normatif. Multikulturalisme deskriptif adalah kenyataan sosial yang oleh banyak pakar digelar sebagai kenyataan pluralistik. Multikulturalisme deskriptif tidak mengakui adanya satu konsep tentang apa yang disebut sebagai sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu tergantung dari nilai pluralistik di dalam masyarakat atau sesuatu yang dianggap benar oleh suatu masyarakat. Sedangkan multikulturalisme normatif berkaitan dengan dasar-dasar moral, dan mengandaikan adanya ikatan moral dari para anggotanya di dalam batas-batas negara atau bangsa untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati bersama. Multikulturalisme normatif merupakan rekonstruksi sosial atau kritik sosial dalam meracik keinginan bersama pada suatu kelompok atau paguyuban atau membangun suatu wadah di dalam pluralitas budaya yang ada di dalam paguyuban tersebut. Dan melihat konteks yang ada

(Yogyakarta: Kanisius, 2000) p. 203.

3. Silvester Kanisius L, Allah dan Pluralisme Religius, Menelaah Gagasan Raimundo Panikkar (Jakarta: Obor, 2006) p. 83.

4. Selamat Sihelomita, "Pendidikan Multikultural sebagai Upaya Mewujudkan Perdamaian di Indonesia" dalam PERSPEKTIF, Jurnal Agama dan Kebudayaan, Vol 4 no. 1, Juni 2009, p. 2.

multikulturalisme normatif sangat relevan dengan keadaan Indonesia yang visi kebangsaannya adalah membangun persatuan dan kesatuan di atas kondisi masyarakat yang sangat plural.⁵

Wawasan multikultural itu lahir dari konteks pluralisme itu sendiri. Pluralisme dan multikulturalisme memiliki makna yang berbeda. Pluralisme biasanya merupakan konsep yang digunakan untuk mengartikan keberagaman sosial dalam suatu masyarakat dan pluralisme menyangkut fenomena seperti keanekaragaman pandangan dunia, etnisitas, agama, peran dan orang-orang dalam masyarakat. Pluralisme itu sendiri mengarah pada sebuah kesadaran dan sikap tentang eksistensi orang lain, adanya perbedaan baik dalam kehidupan nyata maupun kehidupan filosofis dengan segala nuansa representasinya. Umumnya orang mengerti bahwa pluralisme merupakan keanekaragaman yang terdapat dalam suatu masyarakat majemuk, yang mencakup keanekaragaman suku bangsa, agama, bahasa, kebudayaan dan sebagainya.

Sedangkan multikulturalisme mencakup berbagai bentuk budaya yang berbeda dan masing-masing mempunyai integritas dan tantangannya sendiri-sendiri. Ada pakar yang mengutarakan bahwa multikulturalisme adalah ideologi yang mengakui dan menagungkan perbedaaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kolektif. Multikulturalisme adalah paham yang menekankan kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya lain. Dari paham pluralisme di atas ini hendak kita rumuskan bahwa pluralisme itu analogi dari sebuah totalitas maka pluralisme itu dengan sendirinya tidak dapat dimengerti secara sempit apalagi reduktif. Pluralisme itu adalah konteks namun konteks di sini harus dipahami secara luas sebagai berikut:

Pertama: pluralisme adalah latar belakang, wawasan-wawasan mengenai pandangan hidup fundamental masyarakat baik yang tradisional maupun yang modern. Aspek-aspeknya juga luas sekali dan aspek-aspek itu meliputi perjumpaan dengan kenyataan-kenyataan seperti kemajemukan agama, kemiskinan, dialektika mayoritas-minoritas, sekularisasi dan modernisasi, pertarungan ideologi peradaban, dasawajah kekerasan, budaya androsentris. Konteks seperti ini akan membuat kita berpikir dan bersikap untuk

5 Tilaar, HAR., Multikulturalisme (Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional) (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004) p.177.

mengusung pendekatan baik konfrontatif maupun konfirmatif. Pluralisme yang kita lukiskan sebagai konteks pertama ini sering muncul dalam bentuk *world-view* atau pandangan hidup yang sering ditanggap sebagai isi dari jatidiri kolektif sebuah masyarakat.

Kedua: Kenyataan-kenyataan dan masalah-masalah yang kita hadapi atau yang berpapasan dengan proses pendidikan manusia di segala tingkat. Kenyataan yang ada kaitannya dengan bencana manusiawi, situasi kaos yang tidak mampu bergerak menuju kosmos, situasi penantian seorang penyelamat, tragedi-tragedi dan musibah berskala kecil dan besar, dan lebih dari itu bagaimana *world-view* atau pandangan fundamental manusia itu berdampak sosial terhadap semua situasi dan kondisi manusia yang kita lukiskan ini. Sikap kontekstualisasi *world-view* ini dapat membawa manusia kepada "risiko eksistensial" dan "beban intelektual. Risiko eksistensial berarti "manusia harus mampu hidup sesuai dengan hasil pertemuan dua diversitas tersebut sementara itu "beban intelektual" berarti dua diversitas itu harus dicerna secara bersama-sama dalam sebuah kesatuan yang koheren. Ini sering dihubungkan dengan fungsi pendidikan baik formal maupun informal.⁶

Ketiga: bahwa pluralisme dalam sejarah telah membuahkan beberapa pendekatan yang sering masih dicermati untuk disikapi dewasa ini. Ada tiga sikap sebagai contoh yang kita ambil misalnya antara lain dari konteks pluralisme agama yaitu: (1) "**model fisika: pelangi**" (2) **Model Geometris: Invarian topologi;** (3) **model anthropologi: bahasa.**⁷

Model pelangi menganjurkan setiap agama melihat agama lain sebagai warna warni yang dibiarkan dari satu cahaya putih yang sama. Cahaya putih ini menyebar ke dalam tradisi, ajaran, dan agama yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian setiap agama memiliki tampilan luar dengan warna-warna yang berbeda-beda, tetapi warna warni itu tidak menggambarkan hakekat agama itu sebenarnya. Sebab hakekat yang sebenarnya yaitu "cahaya putih" tidak dapat diperlihatkan karena tetap berada dalam kondisi yang sesungguhnya. Dengan ini mau dikatakan bahwa konteks sangatlah penting dalam menilai kebenaran sebuah agama. Model pelangi di atas ini mau mengatakan bahwa pluralisme agama merupakan sebuah keindahan dan kekayaan situasi manusia.

6 Emanuel Gerrit Singgih, Berteologi Dalam Konteks, Pemikiran-Pemikiran Mengenai Kontekstualisasi Teologi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Teologi, BPK Gunung Mulia dan Penerbit Kanisius, 2000) pp.63-65.

7 Silvester Kanisius L, Op.Cit., pp.88-90.

Model Topologis: menandakan bahwa setiap agama dapat bertemu lewat sebuah transformasi topologis yang sesuai atau memadai dan transformasi itu bersifat homeomorfis. Artinya memiliki kesamaan secara fungsional. Dalam model kedua ini kita dianjurkan untuk membuat perbandingan agama dengan memahami agamanya sendiri dan menemukan struktur agama tersebut dan homeomorfismenya pada masing-masing agama. Sekolah-sekolah kita di Jawa sudah berkuat dengan “pendidikan religioitas ketimbang pendidikan religio”. Dalam model kedua ini setiap agama merupakan transformasi dari pengalaman primordial dan bahwa setiap agama merupakan suatu dimensi dari agama lainnya yaitu adanya satu bentuk saling memenuhi yang disebut “circumincessio” atau usaha untuk saling menjelajah. Apakah dalam pendidikan kita ada waktu cukup untuk perbandingan ini atautkah pendidikan itu sudah pepak dengan paket kurikulum yang sangat padat atau kurikulum target.

Model Bahasa: mementingkan digunakannya bahasa bersama untuk memahami diversitas realitas secara bersama. Hanya dengan demikian pemahaman timbal balik dapat muncul ke permukaan. Ibarat seorang penerjemah harus menjadi pembicara dalam bahasa asing dan dalam tradisi asing tersebut ia akan menjadi penerjemah sejati. Demikian pula untuk melihat agama lain, kita harus mampu berbicara dalam dan melalui bahasa tradisi tersebut sehingga kita benar-benar menjadi juru bicara untuk agama lain. Hal itu juga sudah mengandaikan bahwa kita juga memiliki kemampuan untuk mengungkapkan bahasa sendiri. Bahasa di sini adalah “agama”. Dengan jalan ini kita dapat menjadi mitra dialog sejati. Panikkar katakan “**dialog inter-religius**” tidak bisa terjadi tanpa “**dialog intra-religius**”. Dan tujuan model ini bukanlah untuk mengalahkan atau mematikan agama lain melainkan untuk saling menyuburkan dan menjadi anggota agama sendiri secara lebih bermutu. Di sini mau diungkapkan sebuah keyakinan bahwa dialog antarumat beragama sangat mengandaikan jatidiri agama masing-masing dari mitra dialog itu. Dari dialog intrareligius kita menuju dialog inter-religius. Pertemuan antara dua keyakinan telah terjadi dan berlangsung dalam diri kita sendiri terlebih dahulu terutama pengalaman-pengalaman keberagaman yang sehat dan seimbang. Hanya dengan semangat hidup beragama yang baik kita dapat melakukan dialog antarumat beragama yang baik tanpa manipulasi dan tanpa strategi mengalahkan orang lain. Dialog batin dalam diri kita sendiri harus mendahului dialog antarumat

beragama. Jadi dialog interreligius yang sesungguhnya dibarengi dengan atau bersanding dengan dialog intrareligius. Artinya dialog itu sendiri harus dapat mempertanyakan bahkan melepaskan absolutisme kepercayaan saya lalu menerima tergugatnya pola-pola tradisional saya. Seseorang tidak dapat masuk dalam dialog tanpa menerima sikap *self-criticism* atau sikap kritik diri atau introspeksi diri yang benar. Pertemuan seperti itu memang akan menghasilkan sebuah *shock encounter* karena menyaksikan detik-detik pembongkaran agama namun tempat terjadinya sok itu adalah hati setiap pribadi. Ada sintesis personal ketimbang sintesis intelektual yang biasanya kurang sempurna. Dalam model ketiga ini mitra dialog dapat menerima prinsip *one heart many faces* atau "satu hati aneka wajah". Koeksistensi kita menjadi **"koeksistensi eksistensial sekaligus eksperiensial"**.⁸

Dialog yang autentik mengartikan pula perilaku atau pola pikir tanpa adanya superioritas, pra-asumsi, motif-motif atau sikap sikap kucing-kucingan. Kita tak boleh memasuki dialog dengan sikap "apriori" agar dialog menjadi arena studi atau arena pengetahuan. Padahal ketika berdialog dalam diversitas itu kita semua mengoreksi dan dikoreksi, mendengarkan dan didengarkan, memahami dan dipahami, dan dalam pengertian itu mitra dialog dapat tiba dalam "ekwivalensi fungsional". Dewasa ini perjumpaan antaragama bukanlah untuk menimbulkan ketegangan baru atau saling membela ajaran tertentu dengan rumusan-rumusan dogmatis melainkan mencari titik temu demi kemajuan hubungan persaudaraan antara umat beragama. Manipulasi strategis dan penafsiran berat sebelah tidak relevan dalam iklim pluralisme ini.

Dengan ini kita semua menyadari sebuah kenyataan bahwa menerima pluralisme berarti mengakui "kesetaraan hak" setiap agama untuk menyatakan diri sebagai jalan keselamatan. Dan pengakuan kesetaraan hak dan kemungkinan validitas itu dimaksudkan untuk menempatkan agama-agama dalam posisi yang egaliter di meja dialog. Kesetaraan posisi semacam ini merupakan syarat bagi lancarnya dan berjalannya dialog yang otentik. Kemungkinan untuk saling memperkaya dan diperkaya hanya akan terbuka jika agama-agama itu "duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi" sebagai komunitas religius yang egaliter. Nilai bebas, hormat dan setara adalah nilai masyarakat beradab dewasa ini. Kalau begitu kita memiliki alasan cukup agar sekolah kita berwawasan multikultural. Pendidikan berwawasan multikultural

⁸ Ibid., p.96.

adalah sebuah pertanggungjawaban etis yang tidak boleh ditolak. Untuk kita agama Kristen, menolak pluralisme berarti menolak prinsip inkarnatoris atau penjelmaan Allah menjadi manusia dalam budaya sosio-historis tertentu. Menerima inkarnasi lalu menolak pluralisme adalah kontradiksi

Demokrasi yang ideal adalah pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman dan diversitas dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Demokrasi justru ada karena pengakuan terhadap pluralisme, terhadap pendapat yang berbeda, dan kesanggupan menyelesaikan konflik untuk tujuan bersama. Demokrasi adalah pola hidup bersama dan akumulasi pengalaman-pengalaman yang terkomunikasikan bersama. Demokrasi ini tidak dilahirkan secara biologis. Demokrasi seperti ini harus ditata, dilatih, diperjuangkan, ditumbuh-kembangkan dari hari ke hari. Dengan kata lain kita membutuhkan pendidikan yang berwawasan multikultural agar terbiasa dengan apa yang dikenal sebagai "imajinasi analogis".

2. KRITIK PENDIDIKAN DAN EMPAT PILLAR PENDIDIKAN

2.1. Kritik Pendidikan

Perkembangan zaman menuntut perubahan termasuk perubahan paradigma pendidikan. Dalam paradigma lama pendidikan adalah tanggungjawab sekolah dan para pengelola lembaga pendidikan. Lepas tanggungjawab seperti ini akhirnya membuat pendidikan kita ambruk dan suram. Kita butuh paradigma baru yaitu pendidikan harus kembali kepada masyarakat, dan anggotamasyarakat bersama-sama memikul tanggungjawab pendidikan anak-anak bangsa ini. Tidak boleh lagi ada "**etatisme pendidikan**". Banyak juga lokakarya yang memberi judul temu-wicaranya "Quo vadis Pendidikan Indonesia?". Ada pula kecemasan yang seringkali diutarakan oleh beberapa kalangan bahwa sistem pendidikan nasional ini tidak terlepas dari sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan sistem budaya. Bahkan ada yang masih dengan berani mengatakan bahwa ungkapan "**politik adalah panglima**" rupanya belum sirna dari bumi Indonesia ini.

UNESCO⁹ menyatakan bahwa pendidikan demokrasi yang mengandaikan pluralisme itu ditandai oleh hal-hal berikut ini: *pertama*, kebebasan yang disertai tanggungjawab ;dalam kebebasan mengemukakan pendapat ada pengakuan akan hak-hak orang lain dan hak pribadi pihak lain. Hal ini

9 Sindhunata(Ed), Op. Cit., pp.51-52

mungkin kalau kegiatan pendidikan memberi peluang terjadinya dialog dan diskusi kreatif. Tanpa hal ini pendidikan tidak berwawasan multikultural.

Kedua, disiplin diri sendiri yang diwujudkan dalam paradigma interaksi antar pendidik dan peserta didik dan apabila ada konflik penyelesaian diambil tanpa kekerasan baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Pedagogi hitam tidak cocok atau ketinggalan zaman dan merupakan kontradiksi dari pendidikan yang berwawasan demokratis.

Ketiga, keterbukaan terhadap kebenaran ilmiah dan kebenaran lintas batas (*beyond boundaries*) sehingga ada kesiapan untuk berdialog, berkonsultasi, dan bernegosiasi. Dalam hal ini berlaku prinsip "**universitas menjadi multiversitas**". Pendidikan pola domestikasi atau penjinakan harus ditinggalkan dan diganti dengan pola persuasi. Pola persuasi adalah pola yang demokratis dan arena berkembangnya diversitas yang kreatif.

Keempat, berpikir kritis dalam mencari kebenaran yaitu menggunakan pikiran yang kritis dan jernih dan melakukan keputusan berdasarkan informasi yang cukup dan valid, bukan atas prasangka atau generalisasi apalagi stereotip. Hal ini menuntut pendidikan memberi peluang untuk kreativitas dan diversitas pendapat yang lebih bermutu.

Kelima, solidaritas menggarisbawahi kerjasama yang baik dalam pengambilan keputusan bersama tanpa paksaan dalam segala bentuknya, tanpa sikap apriori mencari solusi dalam damai.

Kerjasama sudah mengandung pengakuan akan hak dan kemampuan orang lain. Fenomena pluralisme dalam nuansa demokratis tidak kehilangan signifikasinya.

Keenam, antara orang-orang yang diserahi tugas untuk memimpin dan yang dipimpin, peserta didik dan pendidik, ada saling percaya yang tinggi dan saling menghormati. Tidak ada relasi subyek-obyek, relasi pusat-pinggiran apalagi relasi "tuan hamba" yang menjadi citra paradigma lama pendidikan yaitu paradigma hegemonik.

Ketujuh, persamaan dengan keyakinan akan martabat manusia serta pengakuan akan hak-hak peserta didik atau hak-hak orang lain atau hak pihak lain. Tidak ada pendidikan tanpa pendekatan humaniora. Pendidikan autoritarian harus digeser menjadi pendidikan humanitarian dalam segala nuansanya.

Kedelapan, kesadaran untuk menjadi warganegara yang aktif dan bertanggungjawab atas kebaikan bersama dan berpendirian bahwa tanggungjawab jatuhbangunnya lembaga Negara adalah tanggungjawab bersama. Dengan ini etatisme pendidikan tidak cocok dengan pendidikan demokratis yang bernuansa multikultural. Pendidikan harus membangun wawasan bernegara atau wawasan kebangsaan yang sehat tanpa xenophobi atau primordialisme picik.

Dengan pendidikan demokratis versi UNESCO seperti ini dapat diharapkan lima ketrampilan pokok yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik yang selama ini tidak ditransfer lewat pendidikan formal. Lima ketrampilan pokok tersebut adalah: mengidentifikasi, merencanakan, mengalokasikan sumber daya; -bekerjasama dengan orang lain; memperoleh dan memanfaatkan informasi; memahami hubungan timbal balik antara pelbagai fenomena yang kompleks; dan bekerja dengan berbagai teknologi.

Pendidikan multikultural merupakan fenomena yang relatif baru di dalam dunia pendidikan dan merupakan gejala baru di dalam pergaulan umat manusia yang mendambakan kesamaan hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama bagi setiap orang. Lebih lanjut kita menyaksikan kenyataan bahwa pendidikan multikultural telah menjadi komitmen global yang memberikan beberapa rekomendasi atau pesan antara lain:

pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui nilai-nilai yang ada dalam kebinekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja sama dengan orang lain; pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat; pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan; pendidikan hendaknya meningkatkan pengembangan kedamaian dalam diri peserta didik sehingga mereka lebih mampu membangun kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi pengalaman.¹⁰

Pendidikan demokratis bernuansa multikultural mendidik seseorang sehingga ia yakin bahwa ia dapat berpikir kritis dan independen, dapat menggunakan informasi dari pelbagai sumber dan referensi, memanfaatkan

10 Shelomita Selamat, Op. Cit., p.7.

Informasi dan teknologi tepat guna untuk mengambil keputusan. Multikulturalisme lebih cocok dengan pendidikan yang menggunakan pendekatan kolaboratif dan kooperatif ketimbang pendekatan kompetitif yang tidak sehat lewat penetapan ranking-ranking atau penetapan kelas unggul bagi peserta didik.

Pertanyaan yang tidak kalah pentingnya adalah apakah perguruan tinggi atau para pendidik juga menghayati pola pendidikan demokratis seperti yang diutarakan diatas ini? Apakah ada keterbukaan sehingga mahasiswa boleh berbeda pendapat dan perbedaan itu didiskusikan atau diutarakan tanpa ketakutan? Apakah mahasiswa didorong untuk memperoleh informasi lebih dan bagaimana caranya demokrasi diukur bukan dari segi kuantitas melainkan dari segi kualitas? Semua kritikan ini harus memperoleh tolok ukurnya dari empat pilar pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO TAHUN 1998.

3. EMPAT PILAR PENDIDIKAN¹¹

Sejak tahun 1997 UNESCO sudah mulai memperkenalkan kembali empat pilar mendidikan karena abad 21 ini pendidikan diramalkan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam empat pilar ini pendidikan berwawasan multikultural dapat kita utarakan secara bertanggungjawab.

3.1. *Learning to Know*

Pilar ini berbicara tentang tiga hal yaitu materi pembelajaran, proses pembelajaran dan si pembelajar sendiri yang berbeda. Dalam proses pembelajaran ini telah hadir paradigma baru yaitu bahwa guru atau sekolah bukan lagi satu-satunya sumber atau gudang ilmu pengetahuan. Peserta didik mendapat pengetahuan dari banyak sumber dan informasi yang diperoleh sering diluar dugaan dan perkiraan para pendidik sendiri. Pendidik adalah "fasilitator" dan lewat proses itu terjadilah apa yang diutarakan di depan bahwa "universitas menjadi multiversitas". Lembaga hanya berusaha agar kemampuan belajar para peserta didik menjadi "habitus" seumur hidup. Peserta didik tidak lagi berkutat dengan upaya "**search informasi**" melainkan dengan "menjaring dan memilih informasi yang berguna bagi hidupnya. Dengan sendirinya pilar ini telah membayangkan kepada kita betapa para guru pola lama harus benar-benar merubah diri untuk menghayati pola

11 Sindhunata[Ed], Op. Cit., pp.54-56

baru. Si pembelajar abad 21 ini mungkin juga sangat berbeda dengan yang sebelumnya karena logika mereka sangat dipengaruhi dengan *video games*, dan batas geografis yang semakin kabur. Jadi pendidik yang tidak mengikuti dan menyikapi materi pembelajaran dengan benar atau yang masih menghayati *bank system education* pasti tidak akan demokratis dalam sikap-sikapnya.

3.2. Learning to Do

Learning to do adalah pilar kedua yang lebih menjawab pasar kerja yang ada kaitannya dengan pendidikan kejuruan. Pilar kedua ini didukung oleh ilmu yang berdiri sendiri dan bukannya terapan dari matakuliah tertentu. Kemudian ada kegiatan laboratorium, praktikum praktek Kerja Lapangan. *Learning to do* masa depan sudah tidak lagi terkait dengan pendidikan ketrampilan fisik rutin melainkan lebih memperhatikan "kompetensi personal" yang menggabungkan ketrampilan dan bakat, seperti perilaku sosial, prakarsa personal, dan kehendak untuk mengambil risiko.

Kompetensi personal ini mestinya tidak jauh dari lima ketrampilan pokok yang diperlukan peserta didik di manapun dan kapanpun untuk memberdayakan manusia : ketrampilan dasar(membaca,menulis,berbicara, mendengarkan,berhitung); -ketrampilan berpikir(berpikir kreatif, mengambil keputusan, *problem solving*, penalaran); kualitas kepribadian seperti *self-esteem*, tanggungjawab dan kemampuan bersosialisasi, *self-management*, integritas dan kejujuran). Pada masa depan kemampuan untuk menjalin hubungan interpersonal akan mengalahkan ketrampilan intelektual. Jenis pekerjaan diramalkan akan berubah kepada industri jasa (konsultan, manajemen, keuangan, akuntansi, layanan sosial, kesehatan, pendidikan) yang membutuhkan hubungan interpersonal, komunikasi dan informasi. Untuk negara berkembang seperti Indonesia pendidikan dapat berperan sebagai penguat potensi-potensi lokal.

3.3. Learning to Live Together

Learning to live together adalah pilar pendidikan ketiga yang merupakan kebutuhan bahkan keharusan karena bersama dengan tiga pilar lainnya. Pilar ini berpautan erat dengan penghayatan nilai-nilai dalam hidup bersama. Pilar ini menjadi makin hari makin penting karena dunia telah pepak dengan konflik pelbagai bentuk dan kita juga telah menyaksikan banyaknya pelanggaran hak-hak asasi manusia. Ada kesadaran baru yang mau dibangun lewat pendidikan

yaitu bahwa kehidupan dalam damai itu bukan tanggungjawab negara melainkan semua anggota komunitas pendidikan: masyarakat, orangtua, siswa/mahasiswa, guru/dosen, dan semua pihak tanpa kecuali. Keragaman budaya, bahasa, politik, agama harus dipajangkan sebagai sebuah etalase kedamaian dan semua keragaman itu ditanggap sebagai pelestarian nilai-nilai budaya dan kemanusiaan sehingga hidup bersama dalam keragaman tidak dilihat sebagai beban atau kutukan melainkan sebagai berkat dan rahmat.

Di sinilah kita menyaksikan dinamika *passing-over* sekaligus *coming back*, "prinsip keberakaran bersanding dengan prinsip keterbukaan", otonomi berbarengan dengan solidaritas, hidup bersama diracik tanpa arogansi, keberakaran bukanlah sebuah xenophoby melainkan terbuka menjadi "interkulturalitas". Pilar pendidikan ketiga akan mendorong lembaga lembaga pendidikan merubah cara pandang lama dan merangkul cara pandang baru yang meracik diversitas sebagai mosaik-mosaik kehidupan bersama yang kreatif dan inovatif, aktif sekaligus menyenangkan. Hidup bersama lalu dirumuskan secara sadar sebagai *civil society* atau masyarakat beradab tanpa benturan peradaban yang merugikan atau menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan.

3.4. Learning to Be

Learning to be adalah pilar pendidikan keempat yang menawarkan kepada kita sebuah cita-cita besar seluas kemanusiaan itu sendiri. Pilar ini adalah dampak dari pemanfaatan ilmu pengetahuan yang dipelajari baik lewat sekolah maupun referensi lainnya. Pilar ini mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah pengembangan manusia dan tercapainya perkembangan secara maksimal dan seutuhnya dalam kepribadian, seluruh bentuk ekspresi dan komitmen sebagai anggota masyarakat. *Learning to be* adalah pilar yang mengemukakan tujuan pendidikan sebagai proses berkelanjutan untuk menyadari dirinya sendiri dalam relasi dengan orang lain, mengetahui apa yang harus dilakukannya dan melakukan apa yang diketahui itu dengan baik pula. Dengan kata lain *learning to be* mengemukakan elemen-elemen sebuah profesionalisme yaitu pengetahuan, ketrampilan, sikap-sikap yang bertanggungjawab serta habitus yang dapat diturunkan.

4. PENDIDIKAN BERWAWASAN MULTIKULTURAL

Pendidikan di abad 21 diramalkan akan amat berbeda dengan masa sebelumnya. Mahasiswa yang tadinya sibuk dan repot mencari informasi harus merubah sikapnya untuk menjangkit informasi dari banjir informasi apalagi karena universitas telah menjadi multiversitas. Lembaga pendidikan mungkin juga tidak akan membutuhkan gedung yang mentereng dan luas karena proses pembelajaran sudah masuk ke dalam *e-learning*. Dunia yang penuh konflik juga diberi perhatian agar mahasiswa tidak saja bersikap toleran melainkan bersikap hormat kepada pendapat lain yang berbeda, menyelesaikan segala sesuatu dengan damai (*non-violence*) dan menghargai hak serta milik orang lain. Monokulturalisme telah bergeser ke multikulturalisme. Pendidikan yang ditata dengan kurikulum nasional harus dapat bersanding dengan kurikulum lokal agar peran peserta didik tidak tercabut dari akar budayanya.

4.1. Makna Pendidikan Multikultural Pada Umumnya

Pendidikan multikultural disadari sebagai fenomena yang belum terlampau lama disadari dalam dunia pendidikan. Diskusi mengenai pendidikan multikultural muncul ke permukaan sebagai kesadaran baru yang berhubungan erat dengan akar sejarah konsep-konsep yang bertalian dengan "kebudayaan, pluralitas dan multikulturalitas". Kebudayaan dipahami sebagai cara memahami, percaya dan menilai serta cara berperilaku. Kebudayaan menyedilkan sebuah *blueprint* yang menentukan cara seorang individu berpikir, merasa, dan bertindak sehari-hari. Kebudayaan merupakan hal yang sangat erat dengan pribadi manusia sehingga kalau kita tidak memahaminya kita akan bersikap sangat berbeda dari yang lainnya. Kebudayaan memberikan sebuah identitas menyeluruh dari kita lewat kata-kata yang dapat diterima, tindakan, gerak-gerik, warna suara, raut wajah, bagaimana kita menggunakan waktu, ruangan, benda-benda, cara kita bekerja, bermain, menyatakan cinta, dan mempertahankan diri sendiri. Kebudayaan tidak hanya merefleksikan tingkah laku kita melainkan menentukan cara kita berpikir dan merasa sesuatu. Kebudayaan itu tidak dilahirkan secara biologis melainkan dipelajari, dan proses belajar itu sering digelar dengan nama "enkulturasi".¹²

12. Diah Imaningrum Raphaella, "Multicultural Education: Its Implication to Teaching And Teacher's Attitude, dalam PERSPEKTIF, Jurnal Agama Dan Kebudayaan, Vol.4, No.1, Malang, Juni 2009, p.62.

Berkenaan dengan kebudayaan ada sebuah prinsip yang disebut "relativisme kebudayaan", dan fenomena itu dipahami sebagai sebuah sikap untuk mengerti sistem kebudayaan lain dalam narasi-narasi mereka dan bukannya dalam narasi-narasi ciptaan budaya kita sendiri. Kemampuan ini makin hari makin merupakan kebutuhan dunia dewasa ini sebagai akibat dari kenyataan bahwa pelbagai negara dan kebudayaan makin menjadi independen. Relativisme kebudayaan menganjurkan kita semua untuk pertama-tama mengetahui lebih banyak tentang kebudayaan kita sendiri seperti belum pernah terjadi sebelumnya dan sesudah itu baru kita berupaya untuk mengetahui kebudayaan lain. Multikulturalisme memberikan pengakuan akan keragaman kebudayaan dalam satu masyarakat. Umumnya kita sadar bahwa ada tiga komponen penting yang diangkat ke permukaan oleh fenomena multikulturalisme yaitu: "-bahwa multikulturalisme harus berbuat sesuatu dengan kebudayaan; "-bahwa multikulturalisme itu memberikan pengakuan atau afirmasi terhadap keragaman budaya; "-bahwa multikulturalisme itu sendiri mengandaikan cara-cara spesifik sebagai jawaban terhadap keragaman budaya tersebut. Multikulturalisme berpijak pada keyakinan bahwa semua kebudayaan itu ada sisi kuat dan sisi lemahnya, dan bahwa tidak ada kebudayaan yang sempurna, dan yang kita saksikan secara kasat mata adalah bahwa ada keragaman budaya dan dalam keragaman itu tidak ada standard universal yang dapat mengukur hanya kebudayaan tertentu saja.¹³

Pendidikan multikultural dapat dipandang sebagai sebuah dimensi praktis dari multikulturalisme. Fenomena ini merupakan seperangkat konsep, petunjuk perilaku, dan arena dimana dapat dirumuskan secara resmi dalam narasi-narasi multikultural yang ditemukan dalam materi pendidikan seperti: pedoman, cara belajar-mengajar, kompetensi guru, relasi sekolah dan masyarakat. Dengan ini mau kita katakan bahwa pendidikan multicultural adalah implementasi dari multikulturalisme. Dan lewat pendidikan multicultural yang adalah sebuah proses yang panjang dalam segala aspek pendidikan hasil yang dapat kita harapkan adalah sebuah integrasi masyarakat yang dirajut secara beradab dan kreatif. Baik sekali untuk disadari bahwa pendidikan multikultural itu berpijak pada cita-cita keadilan sosial, pendidikan yang adil dan beradab, dan untuk itulah pendidikan multikultural merupakan sebuah komitmen yang dari hari ke hari mempermudah peserta didik dan

13 Ibid., p.62-63.

seluruh paguyuban pendidikan untuk meningkatkan sebuah potensi mereka secara penuh dalam kancah kehidupan yang aktif secara lokal, nasional maupun secara global. Dan pendidikan multikultural ini percaya bahwa sekolah dapat meletakkan basis perubahan atau transformasi masyarakat sambil mengenyahkan atau eliminasi penindasan dan ketidakadilan.¹⁴

UNESCO dalam konferensi dunia di Thailand tahun 1991 sepakat bahwa pendidikan multikultural adalah gejala baru dalam pergaulan umat manusia yang mendambakan persamaan hak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama bagi setiap orang. Wacana pendidikan multikultural telah menjadi komitmen global yang dicanangkan oleh konferensi UNESCO bulan Oktober 1994 dan wacana yang digulirkan ini mengandung beberapa pesan sebagai berikut:

- bahwa pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebinekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerjasama dengan yang lain,
- bahwa pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkuat perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat;
- bahwa pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan,
- bahwa pendidikan hendaknya meningkatkan pengembangan kedamaian dalam diri peserta didik sehingga dengan demikian mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara.¹⁵

Pendidikan multikultural adalah perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merenungkan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan¹⁶. Selanjutnya kita juga sadar bahwa pendidikan multikultural adalah konsep, ide, atau falsafah sebagai rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya, dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-

14 Ibid., p.63.

15 Shelomita Selamat, Op. Cit., p. 6-7.

16 Ibid., p.7.

kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun Negara.¹⁷ Sudah sangat sering diutarakan bahwa pendidikan multikultural itu merupakan kontradiksi dari rasisme dalam segala nuansanya, dan yang menembus seluruh aspek pendidikan agar sikap serta pengetahuan berkembang dan memungkinkan murid bekerja bagi keadilan sosial.¹⁸

Pendidikan multikultural bertujuan mempersiapkan peserta didik agar dapat membangun relasi yang sehat baik dengan lingkungan mikro kebudayaannya sendiri maupun dengan lingkungan makro kebudayaan lain. Kemampuan interkultural mengandaikan kemampuan intrakultural dan kedua-duanya merupakan kebutuhan zaman kita sekarang ini. Bagi guru hal ini merupakan hal yang sangat penting agar dia bisa memfasilitasi peserta didik berkembang secara fisik dan intelektual. Kita sudah hidup dalam sebuah dunia yang pepak dengan keragaman dan kita sepertinya masih awam sekali ketika berhadapan dengan fenomena itu. Jadi dalam ranah multikultural ini pendidikan adalah sesuatu yang penting agar kita tidak awam dan belajar mempersiapkan peserta didik untuk berfungsi dengan baik dalam setting itu.

Sudah ditemukan banyak sekali argumentasi mengenai perspektif multikultural yang harus ditanggapi dengan sikap-sikap interkultural dalam segala nuansanya. Interkulturalitas yang dirajut oleh pendidikan itu bagi peserta didik cocok dengan konteks pluralitas masyarakat. Namun sering sekali disadari bahwa perspektif multikultural ini ditelaah harus melewati paling kurang empat tingkat yang berbeda.¹⁹

Tingkat Pertama adalah **Toleransi**. Toleransi adalah kemampuan untuk bertahan dengan sesuatu tanpa menerimanya secara penuh. Apa yang ditolerir hari ini belum tentu berlaku di masa masa yang akan datang. Jadi toleransi adalah tahap pertama dari pendidikan multikultural di sekolah yang menerima bahwa perbedaan kultural di sekolah misalnya adalah hal yang tak bias ditolah dalam masyarakat yang pluralistik.

Tingkat Kedua adalah **Penerimaan**. Tahap ini menerima perbedaan yang ada dan tidak juga menyangkal kepentingannya. Jadi kalau sekolah menerima perbedaan maka sekolah menyiapkan ruang agar perbedaan itu dapat dilihat. Perbedaan itu dipajang di hadapan umum atau bahwa ada

17. Tilaar, HAR., Op.Cit., p. 181.

18. Shelomita Selamat, Op. Cit., p.7.

19. Diah Imaningrum Raphaella, Op. Cit., p. 71.

peluang untuk merayakan perbedaan itu misalnya lewat hari atau malam budaya.

Tingkat Ketiga adalah **Penghormatan**. Ketika perbedaan dihormati maka sikap itu merupakan basis rancang bangun pelbagai program dalam lingkungan sekolah. Realitas yang sama yang ditelaah oleh peserta didik akan menggunakan nilai dan pengalaman peserta didik dan pendekatan yang berbeda-beda itu akan membangun sebuah sikap tetap atau habitus baru dalam diri peserta didik yang sering digelar sebagai "intekulturalitas".

Tingkat Keempat adalah **afirmasi, solidaritas dan kritik**. Tingkat tertinggi dari pendidikan multikultural berarti menerima bahasa dan pengalaman cultural peserta didik sebagai sarana yang sah dalam pembelajaran. Dengan itu tidak dimaksudkan bahwa pengalaman atau sarana itu tidak dapat berubah atau dikritik penampilan-penampilan publiknya. Karena pendidikan multikultural itu berkaitan erat dengan penegakan kesetaraan dan keadilan sosial untuk semua orang dan arena nilai-nilai dasar pelbagai kelompok itu dapat berlawanan secara diametris dengan sendirinya konflik dapat terjadi. Menerima secara pasif kemapanan sebuah budaya tentu tidak konsisten dengan pendidikan multikultural.

Paul Gorski dan Bob Covert mengutarakan lima konsep pendidikan multikultural sebagai berikut:- (1) setiap peserta didik harus memperoleh peluang yang sama untuk mengembangkan secara penuh kemampuannya: (2) Setiap peserta didik harus dipersiapkan untuk secara penuh dan cerdas berpartisipasi dalam masyarakat yang semakin intercultural.(3) Guru-Guru harus juga disiapkan agar secara lebih trampil mendampingi peserta didik untuk belajar ditengah-tengah situasi yang sama ataupun yang sangat berbeda latarbelakangnya. (4) Sekolah-sekolah harus aktif membeantas semua bentuk penindasan, pertama-tama di dalam lingkungan sendiri lalu menggalang kesadaran yang sama di kalangan mahasiswa.(5) Pendidikan harus makin hari makin berpusat pada peserta didik dan harus juga mendengar suara dan pengalaman peserta didik.Sudah sangat disadari bahwa pendidikan demokrasi atau multikultural ini tidak dapat berjalan apabila pembuat kebijakan, rektor, dosen, karyawan, masyarakat sendiri tidak mempunyai pola hidup belajar sepanjang hayat untuk menghargai orang lain yang berbeda pendapat, berbeda etnis,berbeda agama, berbeda status sosial-ekonomi, berbeda aliran politik.²⁰

²⁰ Ibid., p.65.

4.2. Akar Historis Pendidikan Multikultural

Keragaman budaya itu hadir disekitar kita.Kita semua sepertinya sadar bahwa pendekatan multikultural termasuk dalam pendidikan harus merupakan hal yang mendapat perhatian Negara-negara yang warganya heterogen seperti di Indonesia.Keperihatinan utama adalah bagaimana membuat semua keberagaman itu memberikan manfaat maximal bagi semua warga yang ada dalam Negara tersebut.Negara-negara yang heterogen harus lewat pendidikan mengembangkan rasa toleran bahkan rasa hormat terhadap pelbagai agama,bahasa,budaya dan etnis,kelas sosial dan sebagainya.Namun kita juga tahu bahwa pendidikan multikultural tidak dapat dibicarakan sampai tuntas diluar konteks historisnya.Lihat saja contoh-contoh berikut ini.

4.2.1. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat misalnya pendidikan multikultural itu bersemi dan bertumbuh akibat praktek-praktek segregasi dan diskriminasi yang parah dan kejam.Pendidikan multikultural mulai digalakan tahun 1960 dan lahir ditengah-tengah perjuangan sosial sebagai protes terhadap diskriminasi di bidang ekonomi dan disriminasi yang berbasis agama,ras,etnisitas ,jender, orientasi seksual ect.Makamah Agung Amerika lalu mengumumkan "Civil Right Bill" 1964 untuk menghapus diskriminasi di sekolah-sekolah publik Amerika Serikat. Namun kita juga melihat bahwa politik public yang digulirkan ini masih membuahkan konflik panjang lewat kritik-kritik keras bahkan arus sinisme di dalam negeri yang boleh dikatakan terkemuka dalam kebebasan dan demokrasi.Walaupun ada banyak sekali tantangan terhadap tanda zaman multikulturalisme ini namun akhirnya mereda dan pendidikan multikultural sepertinya mendapat lahan subur untuk bertumbuh dan berkembang. Tahun 1980 tuntutan terhadap pendidikan jenis ini mulai diterjemahkan kedalam buku-buku pegangan, diracik dalam kurikulum nasional. Para guru yang diangkat untuk mengabdikan di sekolah-sekolah sudah diatur dalam terang filsafat pendidikan multikultural ini dan memang karena citra sekolah yang makin lama makin multikultural adalah dorongan besar untuk meningkatkan dan memperbaiki model-model pendidikan multikultural. Buku-buku pegangan mulai diperbaiki agar lebih menyapa peserta didik dari pelbagai latarbelakang walaupun masih ada banyak kekurangan seperti bertambahnya informasi tentang kelompok-kelompok minoritas seperti di

Inggeris, Canada dan Australia. Akhirnya pendidikan multikultural di amerika tidak lagi hanya berkuat dengan revisi buku-buku pegangan melainkan seluruh sistim pendidikan nasional. Guru-guru yang diangkat untuk menjadi guru harus cocok dengan visi multikultural untuk memperbaiki paradigma lama yang tidak adil. Kesadaran dan ekologi pikiran dibangun di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan toleransi dan mengurangi prasangka terhadap suku atau bangsa lain.²¹

4.2.2. Afrika Selatan

Di Afrika Selatan pendidikan multikultural merupakan gerakan kontras dan reaksi terhadap politik Apartheid Pemerintah. Sebelum 1994 ketika sebuah transisi menuju demokrasi bergulir di Afrika Selatan namun belum cukup kelihatan pertimbangan terhadap hadirnya kebijakan multikultural di Afrika Selatan. Banyak kebijakan politis masih terlalu berpihak kepada orang putih, orang Kristen dan Afrika sendiri. Masih ada banyak kekerasan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Masih ada diskriminasi antara orang putih dan orang hitam. Tidak ada kesetaraan dalam bentuk apapun. Tahun 1994 menteri pendidikan nasional Afrika selatan baru menggulirkan sebuah sistem pendidikan nasional bagi semua tanpa ada perbedaan. Dan dalam sistim baru itu ada kewajiban belajar bagi semua anak tanpa kecuali dan tanpa tolok ukur etnis atau warna kulit lagi.²²

4.2.3. Indonesia

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralis. Keanekaan dan kemajemukan budaya, agama, ras merupakan kekayaan bangsa kita. Namun keberagaman ini sudah menyebabkan terjadinya konflik kekerasan aneka wajah di Indonesia. Tak dapat dipungkiri bahwa konflik dan kerusuhan yang terjadi sudah sangat banyak bermuatan SARA. Sebut saja konflik atau kerusuhan di Ambon, Aceh, Poso, Sampit dan Sambas beberapa waktu lalu. Kita juga melihat bahwa tidak semua pihak dapat menerima keragaman ini secara lapang dada. Kenyataan yang terjadi, ada pihak-pihak yang memaksa untuk membentuk masyarakat yang homogen, dengan dalih demi persatuan dan kesatuan atau demi "mitos mayoritas" dan jelas sekali bahwa penyeragaman seperti ini justru tampil anti-keanekaragaman, anti lokalitas

21 Ibid., p.66-67.

22 Ibid., p. 67.

dan juga berarti anti demokrasi.²³ Ada dua hambatan besar sebagai konteks untuk membangun pendidikan multikultural adalah menguatnya “politik identitas” dan makin maraknya “etnisitas”.²⁴ Politik identitas dan etnisitas di rekayasa dan dimanipulasi oleh negara dan agama untuk menonjolkan identitas perbedaan sehingga menghambat komunikasi antar-budaya yang seharusnya berpijak pada kesetaraan dan saling menghormati. Tak dapat dipungkiri bahwa berbagai masalah sosial dan konflik-konflik aneka wajah yang terjadi di Negara Indonesia disebabkan oleh faktor masih rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat sehingga mudah sekali terpengaruh oleh provokasi yang bertujuan menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Menyimak begitu banyak konflik yang terjadi di Negara kita ini dan konflik itu sarat atau pepak dengan nuansa eksklusif maka pendidikan multikultural adalah sebuah paradigma baru dalam sistim pendidikan nasional Indonesia. Kita sudah lama juga memperhatikan hadirnya empat acuan pokok untuk merumuskan pendidikan multikultural di Indonesia²⁵ yaitu:

4.2.3.1 Undang-Undang Dasar 1945

Dalam UUD 1945 diakui perbedaan dan keanekaragaman Indonesia. Simbol Garuda Pancasila dengan motto Bhineka Tunggal Ika memang sangat jelas mengutarakan keyakinan nasional bahkan sudah membayangkan kepada kita sebuah *imagine community* atau rancang bangun bangsa Indonesia ini. Namun tetap disadari bahwa semboyan itu berisi pula perjuangan untuk menghayatinya dari hari ke hari. Harmoni antara unitas dan diversitas ternyata bukan hadiah yang diturunkan dari langit melainkan harus lewat perjuangan pula. Dan menanamkan harmoni itu di hati bangsa Indonesia pasti tidak semudah membalik telapak tangan melainkan lewat sebuah proses panjang perubahan sikap, dan proses situ tidak lain dari pendidikan di mana peserta didik diberi peluang untuk mengenal budaya sendiri, mengenal budaya lain dan membangun sikap terhadap eksistensi budaya lain tersebut. Pendidikan multikultural adalah sebuah proses konsientisasi atau penyadaran ekologi pikiran untuk bisa berbaur dan mengusung interkulturalitas.

23 Ibid., p. 68-69

24 Shelomita Selamat, Op. Cit., p. 12.

25 Ibid., p.8-10.

4.2.3.2. TAP MPR No.VII/MPR/2001

Ketetapan MPR ini menekankan Etika kehidupan berbangsa yang disinyalir telah sirna bertolak dari pelbagai konflik yang terjadi di Negara kita. Ada enam narasi bidang Etika Kehidupan berbangsa yang dirumuskan yaitu: **-Etika sosial budaya; -Etika Politik Pemerintahan; -Etika ekonomi -bisnis; -Etika Penegakan Hukum yang berkeadilan; -Etika keilmuan; dan -Etika Lingkungan Hidup.** Pendidikan multikultural bermanfaat untuk mengembangkan etika kehidupan berbangsa. Semua diajak untuk membuang pengajaran agama yang sempit, penegakan hukum yang tebang pilih, kurangnya respek kepada perbedaan budaya dan agama seperti terangkat dalam berbagai konflik yang terjadi di bumi Indonesia ini.

4.2.3.3. Visi Indonesia 2020

TAP MPR No. VII/ MPR/2001 merumuskan visi Indonesia 2020 sebagai *Imagined Community* yang harus berpapasan dengan begitu banyak tantangan. Tantangan itu harus dihadapi lewat proses pendidikan dan pembinaan terus menerus agar tidak terjadi perpecahan bahkan kehancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditekankan kembali pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara seperti UUD 45, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan Wawasan Nusantara. Dalam bingkai visi 2020 ini terletak pentingnya pendidikan multikultural sebagai sarana efektif untuk memupuk dan mengembangkan sikap interkultural dalam diri peserta didik agar lebih mampu menghargai diversitas atau kemajemukan yang ada.

4.2.3.4. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Walaupun Undang-undang ini hanya berbicara secara implisit atau tersirat karena tidak dinyatakan secara tekstual mengenai pendidikan multikultural namun kemungkinan pendidikan multikultural dapat dikembangkan. Ketika dirumuskan tolok ukur sebuah pendidikan yang bermutu pada pasal 4 diutarakan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai basis agama, nilai-nilai budaya dan keragaman bangsa Indonesia. Sebagai paguyuban yang majemuk maka individu-individu yang berada dalam masyarakat perlu saling belajar satu sama lain demi terciptanya rasa hormat terhadap berbagai perbedaan yang ada. Saling belajar ini harus diracik secara sistematis dalam sebuah sistem pendidikan multikultural.

4.3. Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Lembaga Pendidikan

4.3.1. Kurikulum

Menyusun kurikulum pendidikan multikultural bukanlah hal yang mudah. Ada banyak hal yang perlu dicermati agar kurikulum tersebut benar-benar efektif dalam menumbuhkan nilai-nilai seperti bebas, hormat dan setara dalam diri seorang peserta didik. Pendidikan multikultural bukan berarti disusunnya mata pelajaran multikultural secara khusus melainkan diintegrasikan dengan matapelajaran lain yang sudah ada. Empat pilar pendidikan UNESCO di atas ini telah menjadi landasan desain atau racikan kurikulum menuju pendidikan yang demokratis. Ada mata kuliah dasar umum (MKDU), ada mata kuliah keilmuan dan ketrampilan (MKKK), ada mata kuliah keahlian Berkarya (MKKB), ada mata kuliah perilaku Berkarya (MKPB) dan ada juga matakuliah Berkehidupan bersama (MKBB). Jenis matakuliah ini sinkron dengan empat pilar pendidikan yang baru kita utarakan disini.

Penyusunan kurikulum pendidikan multikultural perlu dipertimbangkan dengan cermat agar sungguh-sungguh efektif dalam membina sikap toleran dalam diri seseorang terhadap mereka yang memiliki pendapat lain dengannya. Toleransi mesti juga ditanggap sebagai sikap yang harus ditingkatkan menuju rasa hormat yang mendalam terhadap mereka yang berbeda dengan kita dalam implementasinya. Ada beberapa kurikulum yang memiliki perspektif multikultural seperti: kewarganegaraan, PPKN, agama, sosiologi, Anthropologi, sejarah, kesenian dan bahasa. Pengembangan pendidikan multikultural dapat juga dilaksanakan melalui model pembelajaran yang beragam seperti melalui kelompok diskusi, kegiatan ekstrakurikuler, sharing kelompok dan mendengar cerita dan sebagainya.

Ada empat prinsip yang perlu dipegang teguh demi tanggungjawab terhadap keadilan sosial oleh paradigma pendidikan multikultural:

4.3.1.1. Pendidikan multikultural menawarkan beragam kurikulum yang mengedepankan pandangan dan perspektif banyak orang;

4.3.1.2. Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada tafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah;

4.3.1.3. Kurikulum yang dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandangan kebudayaan yang berbeda-beda;

4.3.1.4. Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok untuk sungguh-sungguh memberantas stereotip dan prasangka tentang ras, budaya dan agama".²⁶

4.4. Implikasi Dalam Materi Pembelajaran

Ada kenyataan bahwa banyak guru yang tidak pernah menilai keabsahan bahan pelajaran lewat buku-buku pegangan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Sering kita memakai buku-buku pegangan dan membacanya tanpa sikap kritis yang dibutuhkan untuk mencerna atau mempertanyakan validitas sebuah sumber informasi apalagi kalau dihubungkan dengan kepekaan multikultural. Padahal seyogyanya demi perpektif multikultural kita para pendidik mestinya secara kritis menelaah buku-buku pegangan kegiatan pembelajaran. Kita harus menyadari untuk mengenal beberapa bias yang hadir dalam pegangan-pegangan buku tersebut dan berani membangun gerakan kontras terhadap bias-bias tersebut. Sejak tahun 1978 sudah sering sekali diutarakan enam jenis bias dalam materi pembelajaran di kelas antara lain:

4.4.1. Bias Pertama: Banyak mikrokultur tidak digubris secara seimbang sehingga ketidakhadiran mereka dalam kegiatan pembelajaran berakibat bahwa kelompok subkultur ini dianggap tak bernilai, tidak penting atau bermakna bagi masyarakat. Dengan itu berarti ada sikap merendahkan subkultur tersebut, ada paradigma relasi superior-inferior yang merupakan kontradiksi dari pendidikan multikultural.

4.4.2. Bias kedua: Stereotip yang menggambarkan atau menghakimi sebuah budaya tanpa informasi yang memadai. Bias kedua ini berkaitan erat dengan sikap menolak diversitas, kompleksitas serta varietas. Stereotip ini sering terjadi dalam lingkungan budaya yang berbeda dan amat parah terjadi terutama pada saat orang berbicara mengenai profesi dan karier terutama untuk mereka yang dikenal sebagai orang yang mengalami keterbatasan fisik.

4.4.3. Bias Ketiga: Ketidakseimbangan. Bias ketiga ini terjadi pada saat isu-isu atau peristiwa ditafsir bertolak hanya dari satu perspektif atau sudut pandang, dan biasanya perspektif itu adalah milik kelompok mayoritas. Bias seperti ini menghalangi para peserta didik baik yang termasuk dalam kelompok dominan maupun yang terhitung dalam kelompok minoritas

²⁶ Ibid., p. 11.

untuk memahami kompleksitas historis dan perkembangan kontemporer secara sehat.

4.4.4. Bias Keempat: Sikap Tidak Realistis. Buku-buku pegangan sering mengutarakan gambaran-gambaran yang tidak realistis mengenai sejarah dan pengalaman hidup kita. Dengan gambaran seperti ini peserta didik dihalang untuk memiliki informasi yang dibutuhkan untuk mengenal, mengerti, dan mungkin juga untuk mengentaskan masalah-masalah yang menimpa masyarakat kita. Kalau masalah-masalah seperti rasisme, prasangka, sexism, diskriminasi, konflik aneka wajah, perceraian, dan pelbagai musibah sosial lainnya tidak digambarkan secara realistis, peserta didik tidak pernah akan belajar bagaimana mengatasi problem-problem sosial seperti ini. Ada banyak suku yang digambarkan sebagai suku terasing masa lampau saja dan tak pernah diutarakan situasi masa kininya karena dianggap tidak berarti dan tak perlu menjadi bahan pembicaraan apalagi dalam pembelajaran.

4.4.5. Bias Kelima: Fragmentasi dan Isolasi. Buku-buku pegangan ada yang menempatkan beberapa suku atau informasi mengenai suku-suku itu hanya sebagai tambahan dan terpisah dari bab-bab pokok bahan pembelajaran sepertinya ada kesan tidak perlu dibicarakan secara resmi dan menjadi bahagian dari materi pokok pembelajaran. Boleh dibaca sebagai tambahan dan kalau tak dibacapun tidak ada soal. Fragmentasi dan isolasi ini sepertinya sudah menjadi bagian dari kerangka berpikir negatif mengenai subkultur tertentu. Harus ditanam kesan bahwa ada suku yang tidak unggul seperti mereka yang menjadi bahan pembicaraan utama.

4.4.6. Bias Keenam adalah Bahasa. Contoh-contoh yang diangkat sebagai ilustrasi adalah bahan-bahan yang diambil dari suku tertentu yang dianggap terkenal atau yang ditakar sebagai yang utama secara kultural. Hampir tidak ada contoh yang diambil dari bahasa suku yang tidak dominan namun menjadi bagian integral dari sebuah Negara. Dengan itu multikulturalisme dengan segala perspektipnya absen dalam bahan pembelajaran bagi peserta didik dan dengan demikian motto "Bhineka Tunggal Ika" misalnya tinggal hanya slogan saja.²⁷

Seandainya para pendidik tidak menyimak bias-bias ini dalam kegiatan pembelajaran dan dalam buku-buku pegangan di sekolah padahal negara kita adalah Negara kesatuan dan persatuan yang memiliki perspektif multikultural maka para pendidik sebenarnya tidak jujur kepada peserta didik mengenai

27 Diah Imaningrum Raphaella, Op. Cit., p. 71-72.

dunia dimana peserta didik hidup dan berkembang. Karena itu upaya untuk memaknai dan merubah buku pegangan agar lebih multikultural merupakan langkah penting dan langkah yang bertanggungjawab terhadap hakikat negara seperti Indonesia ini walaupun kita juga sadar bahwa merubah buku pegangan pembelajaran saja tidaklah cukup. Sikap-sikap pendidik di kelas juga merupakan faktor kunci dan penting untuk membantu peserta didik menggapai potensi diri mereka secara maksimal tanpa tolok ukur seks, ras, usia, agama dan bahasa. Mungkin kita semua masih ingat pernyataan bijaksana *You are what you read* yang berarti pada saat peserta didik sering sekali berpapasan dengan referensi yang pepak dengan bias gender, suku dan agama, mereka akan bertumbuh dengan prasangka dan kerangka berpikir negatif terhadap orang atau suku lain.

4.5. Implikasi Bagi Sikap-Sikap Pendidik

Pendidik memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi pendidikan multikultural. Guru dan pendidik demi tanggungjawab mulia ini harus juga memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai konsep multikulturalisme agar dapat memberikan pemahaman yang benar kepada peserta didiknya. Saya yakin kita semua sepakat bahwa pelaksanaan pendidikan multikultural hanya dapat berjalan dengan baik apabila para pendidik adalah pemaian dalam kehidupan multikultural. Pelaku pendidikan multikultural adalah para pendidik di lembaga-lembaga pendidikan. Lewat para pendidik ini lembaga-lembaga pendidikan kita bukan hanya menjadi pusat belajar dan mengajar melainkan merupakan pusat penghayatan dan pengembangan budaya, baik budaya local, budaya nasional bahkan budaya global. Dengan kompetensi guru dan para pendidik seperti ini diharapkan para pendidik dapat menolong peserta didik untuk mengembangkan hal-hal penting berikut ini:²⁸

4.5.1. Sadar diri yang tinggi yaitu diri interkultural atau diri korelasional. Pada saat seseorang merumuskan dirinya sebagai unik ternyata keunikan tersebut tidak dapat diperoleh tanpa keunikan orang lain.

4.5.2. Kepekaan dan pengertian tentang orang lain termasuk kelompok budaya dalam sebuah Negara dan juga bangsa lain. Pendidik hendaknya memberi pemahaman bahwa pluralisme seperti itu tidak dapat dibantah dan kasat mata.

²⁸ Ibid., p.73-74.

4.5.3. Kemampuan untuk mengerti tafsiran-tafsiran kultural yang majemuk yang juga kadang-kadang menampilkan tafsiran yang berbenturan satu dengan yang lain mengenai peristiwa, nilai atau tingkah laku.

4.5.4. Kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan-tindakan yang tepat berpijak atau bertolak dari analisa atau rujukan multikultural.

4.5.5. Keterbukaan atau ekologi pikiran pada saat berbicara mengenai pelbagai masalah yang menimpa atau yang sedang terjadi dalam masyarakat pada umumnya.

4.5.6. Pemahaman tentang proses berpikir stereotyp yang merugikan atau yang memojokan orang atau kebudayaan lain yang bertentangan dengan martabat diri sendiri dan berbasis pada rasa hormat kepada orang lain.

Para pendidik akan menghadapi tantangan berat dimasa –masa yang akan datang ini berhadapan dengan keragaman kultural yang dibawa ke kelas oleh peserta didik. Ketrampilan untuk mengajar didalam kelas-kelas seperti ini membutuhkan upaya-upaya keras dari pendidik untuk membekali dirinya sesuai dengan perspektif multikultural ini. Tujuan utama dari semua upaya pendidik ini adalah berfungsinya masyarakat demokratis dalam segala nuansanya dimana tidak ada diskriminasi, penindasan atau ketidakadilan sosial. Para pendidik yang dengan sangat entusias terhadap pendidikan multikultural ini akan dengan penuh semangat juga menggunakan bahan-bahan ajar dengan perspektif ini dan akan mendorong peserta didik untuk membangun sikap atau perilaku serta pola pikir egalitarian. Hal seperti ini akan sangat membantu terutama peserta didik yang kurang beruntung yang seringkali menjadi target dari prasangka dan diskriminasi baik secara pribadi maupun secara struktural. Pendidik sendiri mesti sudah menunjukkan sikap bahwa mereka tidak lagi memperlakukan peserta didik berbasis pada keanggotaan peserta didik dalam mikrokulturnya. Dengan kata lain pendidik harus dengan jiwa besar mengeliminasi pelbagai bias diatas ini dalam kegiatan belajar mengajar. Pendidik sendiri harus menjadi aktivis atau pejuang interkulturalitas itu sendiri. Tanpa sikap-sikap interkultural ini bangsa kita tidak akan mampu mengentaskan ketidakadilan sosial.

5. KESIMPULAN

Demokrasi yang ideal adalah pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman dan diversitas dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Demokrasi justru ada karena pengakuan terhadap pluralisme atau yang memberi apresiasi terhadap wawasan multikultural, terhadap pendapat yang berbeda dan kesanggupan menyelesaikan konflik untuk tujuan bersama dalam damai. Demokrasi atau multikulturalisme itu adalah pola hidup bersama dan akumulasi pengalaman-pengalaman yang terkomunikasikan bersama. Demokrasi atau multikulturalisme dilandasi oleh kondisi terpenuhinya kebutuhan manusia agar diperlakukan adil dan sama, dan kebutuhan untuk dilahirkan sebagai manusia bebas serta kebutuhan-kebutuhan lain yang dipercayai sebagai ciri manusia kodrati. Kebutuhan manusia akan hal-hal yang hakiki ini perlu ditumbuhkan dan dikembangkan dan dalam menumbuhkan kebutuhan akan penghargaan atas hak-hak individu untuk tampil beda dan unik diperlukan pendidikan: pendidikan keluarga, masyarakat dan pendidikan formal. Kalau kebutuhan akan penghargaan terhadap martabat manusia ini tidak dihargai, tidak ditumbuhkembangkan antara lain lewat pendidikan, demokrasi dalam diri manusia akan mati. Pendidikan harus menyadari kenyataan bahwa pengakuan akan kekhasan individual dan kultural seseorang bukan sekadar ungkapan sopan santun terhadap sesama melainkan lebih dari itu yakni merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebaliknya pelecehan terhadap hal ini merupakan represi yang harus dikutuk oleh semua gerakan pembebasan besar kemanusiaan.²⁹

Pendidikan berwawasan multikultural telah menjadi perhatian pelbagai lembaga karena sudah sangat disadari sungguh-sungguh sebagai imperatif pendidikan. Multikulturalisme adalah sebuah realitas yang kasat mata dan tak dapat dibantah. Karena itu filsafat pendidikan pasti juga harus berbasis pada realitas ini. Tanpa realitas multikultural arah dan hasil pendidikan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkan maka tidak etis pendidikan seperti itu diteruskan. Pendidikan adalah proses di mana orang menyadari fenomena koeksistensi egaliter dan bukannya dominasi budaya mayoritas atas budaya minoritas. Tanpa sikap-sikap interkultural dalam negara seperti Indonesia koeksistensi sulit berkembang menjadi proeksistensi. Koeksistensi memberi peluang untuk tinggal dalam

29 Otto Gusti Madung, "Politik Diferensiasi: Memahami Konsep Multikulturalisme Charles Taylor" dalam *Jurnal Ledaleiro* Vol. 9, No.1, Juni 2010, pp.10-11.

tahap toleransi saja sebagai tahap pertama yang kita renungkan diatas ini. Resolusi konflik yang dewasa ini telah menjadi matakuliah di pelbagai perguruan tinggi menawarkan model penyelesaian konflik yang tidak bersifat etnosentris dan menawarkan solidaritas "eyond boundaries atau lintas batas di tengah multikulturalisme.³⁰

Pendidikan multikultural adalah jawaban terhadap kenyataan bahwa pluralisme masyarakat merupakan fakta juga yang terdapa di dunia pendidikan khususnya di lingkungan sekolah. Ketidakmampuan seseorang untuk bersikap toleran, terbuka dan mengharagai nilai-nilai hidup bersama kelompok lain sering menimbulkan masalah. Sikap tertutup, fanatis, penuh prasangka dan pelbagai stereotip antar kelompok sekolah merupakan akar permasalahannya. Sifat, sikap dan ruang gerak guru dari ujung kaki sampai ujung rambut di kepala selalu diperhatikan peserta didik. Dari daya umum sampai gaya khusus seorang guru dapat ditiru oleh peserta didik. Siswa yang mengalami perlakuan beragam dari guru akan memberi bekal untuk mengapresiasi suatu perbuatan yang pantas bila nantinya terjun di masyarakat yang diwarnai kemajemukan. Peserta didik harus disiapkan untuk memahami pluralisme melalui pendidikan nilai. Untuk memperteguh siswa dalam menghargai pluralisme diadakan pembinaan peserta tatkala mereka menghadapi masalah dengan temannya. Sudah sangat sering dibicarakan beberapa pendekatan praktis yang dihayati agar pluralisme dihargai disekolah misalnya memberi ruang gerak secukupnya tanpa tekanan-tekanan dari pihak manapun agar terjadi dialog antar-peserta didik. Kemudian sekolah juga berupaya membangun persaudaraan sejati lewat sikap sportif, jujur dalam bersaing dan bahwa yang unggul itu nampak dalam diri begitu banyak individu bukan miliki eksklusif seorang pribadi. Dari fenomena ini sekolah memberi penghargaan yang tepat sasaran dan tidak diskriminatif akan membangun sikap menerima orang lain dengan jujur. Pendekatan seperti yang baru kita utarakan ini dengan sendirinya akan membangun kedamaian karena benih-benih kedamaian itu sudah ditata dalam pendekatan-pendekatan sebelumnya. Apalagi yang kita kejar dalam pendidikan kalau bukan kasih yang lintas batas ini yang kemudian akan berdampak sosial atau yang akan dibawa ketengah-tengah masyarakat di mana mereka hidup dan berkarya.³¹

30 Ibid., p. 10.

31 Widodo, "Mendidik Siswa Menghargai Pluralisme Masyarakat" dalam EDUCARE Wahana Komunikasi Pendidikan, No. 11/IV/Jakarta, Februari 2008, p. 39-40.

DAFTAR RUJUKAN

- Diah Imaningrum Raphaella., "Multicultural Education:Its Implication to Teaching Material And Teachers,s Attitude" dalam *PERSPEKTIF, Jurnal Agama Dan Kebudayaan, Vol 4, No 1*. Malang, Juni 2009.
- Gerrit Singgit Emanuel. *Berteologi Dalam Konteks,Pemikiran Mengenai Kontekstualisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Teologi, BPK Gunung Mulia dan Penerbit Kanisius, 2000.
- Imam Barnabib, "Renungan Tentang Filsafat Pendidikan Dewasa Ini" dalam Sindhunata (Ed.). *MenggagasParadigmaPendidikan, Demokrasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Komarudin Hidayat & M.Wahyudi Nafis. *Agama Masa Depan, Perspektif Filsafat Perenial*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- L. Kanisius Silvester. *Allah dan Pluralisme Religius, Meneleah Gagasan Raimundo Panikkar*. Jakarta: Obor, 2006.
- Madung Otto Gusti, "Politik Diferensiasi:Memahami Konsep Multikulturalisme Charles Tylor" dalam *JURNAL LEDALERO, Vol 9 No.1, Juni 2010 "Multikulturalisme, Menerobos Ketertutupan Kelompok "Wacana Iman Dan Kebudayaan, STFK Ledalero, 2010*.
- Shelomita Selamat, "Pendidikan Multikultural Sebagai Upaya Mewujudkan Perdamaian di Indonesia", dalam *PERSPEKTIF, Jurnal Agama dan Kebudayaan, Vol 4, No. 1*. Malang, Juni 2009.